



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 322 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik cenderung memiliki potensi terjadinya insiden siber yang dapat menyebabkan aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nirangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan terganggu sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya ancaman siber telah ditetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 225/KEP/HK/2021;

c. bahwa dalam pelaksanaan terdapat anggota Tim Tanggap Insiden Siber yang tidak aktif melaksanakan tugas sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 541);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Tanggap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Tanggap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menerima, meninjau dan menanggapi laporan terkait insiden keamanan siber yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Bidang Keamanan Informasi dan Tim Pelaksana Tanggap Insiden Siber sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA ...




- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 225/KEP/HK/2021 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 September 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
  - 3. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
  - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI                                   |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |  |
| KABAG. BANTUAN HUKUM                             |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 322/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 11 September 2024  
TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO | NAMA / JABATAN  | KEDUDUKAN        | RINCIAN TUGAS   |
|----|---|------------------|---|
| 1  | Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pembina          | Melakukan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan tugas.  |
| 2  | Sekretaris Daerah Provinsi NTT  | Pengarah         | Mengarahkan Tim dalam melaksanakan tugas.   |
| 3  | Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab | a. bertanggung jawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan<br>b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah. |
| 4  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Penanggung jawab |   |
| 5  | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Penanggung jawab |   |
| 6  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Penanggung jawab |   |
| 7  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |
| 8  | Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |
| 9  | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |
| 10 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab |   |
| 11 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |
| 12 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |
| 13 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |
| 14 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Penanggung jawab |   |
| 15 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |   |



|    |   |                  |  |
|----|---|------------------|--|
| 16 | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur                           | Penanggung jawab | <p>a. bertanggung jawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan</p> <p>b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.</p> |
| 17 | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur                        | Penanggung jawab |  |
| 18 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur                            | Penanggung jawab |  |
| 19 | Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur                    | Penanggung jawab |  |
| 20 | Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |  |
| 21 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur                     | Penanggung jawab |  |
| 22 | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur                    | Penanggung jawab |  |
| 23 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur                 | Penanggung jawab |  |
| 24 | Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur                  | Penanggung jawab |  |
| 25 | Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |  |
| 26 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab |  |
| 27 | Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                        | Penanggung jawab |  |
| 28 | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                                   | Penanggung jawab |  |
| 29 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                                | Penanggung jawab |  |
| 30 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  | Penanggung jawab |  |
| 31 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                     | Penanggung jawab |  |
| 32 | Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                       | Penanggung jawab |  |
| 33 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur                       | Penanggung jawab |  |
| 34 | Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung jawab |  |
| 35 | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                 | Penanggung jawab |  |

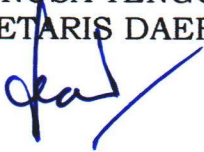


|    |  |                  |   |
|----|--|------------------|---|
| 36 | Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab | a. mengelola serta bertanggungjawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan  |
| 37 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                 | Penanggung jawab | b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.  |
| 38 | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                     | Penanggung jawab |   |
| 39 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                     | Penanggung jawab |   |
| 40 | Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                      | Penanggung jawab |   |
| 41 | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                | Penanggung jawab |   |
| 42 | Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang   | Penanggung jawab |   |
| 43 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur                     | Ketua            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim;</li> <li>b. menyediakan <i>Point of Contact (PoC)</i> untuk NTTProv-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;</li> <li>c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan NTTProv-CSIRT;</li> <li>d. mengoordinasikan NTTProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi NTTProv-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;</li> <li>e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan kinerja NTTProv-CSIRT;</li> <li>f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai NTTProv-CSIRT;</li> <li>g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkup NTTProv-CSIRT; dan</li> <li>h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.</li> </ul> |






|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
| 44 | Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;<br>b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi; dan<br>c. mengoordinasikan penyediaan dan dukungan kelancaran tugas NTTProv-CSIRT. |
|----|--|------------|--|

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI                                   |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |  |
| KABAG. BANTUAN HUKUM                             |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 322/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 11 September 2024  
TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BIDANG KEAMANAN INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO | NAMA / JABATAN   | KEDUDUKAN   | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|-------------|---|
| 1  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Koordinator | a.mengoordinir pelaksanaan tugas NTTProv-CSIRT; dan<br>b.mengoordinir edukasi dan pelaksanaan pelatihan |
| 2  | Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur                      | Anggota     |   |
| 3  | Kepala Bidang Infrastruktur dan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur                     | Anggota     |   |
| 4  | Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota     |   |
| 5  | Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur       | Anggota     |   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI                                   |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |  |
| KABAG. BANTUAN HUKUM                             |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :322/KEP/HK/2024  
TANGGAL :11 September 2024  
TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
TANGGAP INSIDEN SIBER  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO |   | ASAL INSTANSI  | RINCIAN TUGAS   |
|----|---|--|---|
| 1  | Pius B. S.Tukan, SE., S.ST., M.Acc., CRMO, QRMA | Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  | a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat kepada NTTProv-CSIRT;<br>b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;<br>c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan;<br>d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan<br>e. melakukan analisis risiko terhadap penanganan insiden siber. |
| 2  | Meytias Y. Bandie, S.Kom.                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur   |   |
| 3  | Yos Dominggus Rini, S.Kom., M.M.                | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur   |   |
| 4  | Yohanes Manu                                    | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
|    | Dede Wasa                                       |  |   |
| 5  | Piva Olviana Bao, ST.                           | Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
| 6  | Wayan Setiawan, S.Kom.                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
|    | Yolanda Mau, S.Kom.                             |  |   |
| 7  | Jubnianti M.J. Duka. S.Kom                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur |   |
|    | Semuel Oktovianus Balukh                        |  |   |
| 8  | Maria Goreti Samo, SE.                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
|    | Taufik Arzad Ali Samad, S.Kom.                  |  |   |
| 9  | Ruri Tomasoei, S.Kom.                           | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
| 10 | Rathini Sula, S.Kom.                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
| 11 | Salman Alfarisi Hasbullah, S.Kom.               | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur   |   |
| 12 | Helmy Rostiana Naffie, S.Kom.                   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |



|    |                                   |  |   |
|----|-----------------------------------|--|---|
| 13 | Ivan Hidayat Primananda, S.Kom    | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur                           | a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat kepada NTTProv-CSIRT;<br>b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;<br>c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan;<br>d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan<br>e. melakukan analisis risiko terhadap penanganan insiden siber. |
| 14 | George Arnoldus Hans Louk, S.Kom. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur                        |   |
| 15 | Susanto A. Tanody, S.Kom.         | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur                            |   |
|    | Jefri Nisnoni, S.Kom              |  |   |
| 16 | Ignasius Jeremiah Takoy, S.Kom    | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur                    |   |
| 17 | Jacob Oktavianus Adoe, S.Pt.      | Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
| 18 | Willian S. Fina, S.Kom            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur                     |   |
| 19 | Karel F. A. Ochotan, SE., MM.     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur                    |   |
| 20 | Doris Alexander Leky, S.Kom       | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur                  |   |
| 21 | Try Desmiarny Mbeo, S.Kom.        | Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  |   |
| 22 | Alvian Adi Dharma, S.T.           | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |   |
| 23 | Gracetifella M. Malada, S.Kom.    | Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                        |   |
|    | Felipus Y.K. Anugrah Muni, S.Kom. |  |   |
| 24 | Reginaldo Kapilawi, SE            | Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                                   |   |
| 25 | Octavianus Facun Baur, ST, M.CSSE | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                                |   |
|    | Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom   |  |   |
| 26 | Richard J. Mokoginta, S.Kom.      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur           |   |
|    | Yeremia Atto, S.Kom               |  |   |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 27 | Adelysa P. Gittaswara, S.Kom.                                       | Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur                    |
| 28 | Meigel S.A.Toy, S.Kom   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur                    |
| 29 | Petrus Manek, S.Fil.<br>Petrus Kanisius Alex Abimanyu Wawo Wae, ST. | Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                              |
| 30 | Meysiliani S. Bata, S.Kom   | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 31 | Franky Juhar, S.Kom.  | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                 |
| 32 | Mario O.M. Wangge   | Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                     |
| 33 | Immanuel Here Wele, S.Kom   | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                     |
| 34 | Mikael J. Kuman, SE<br>Debby Tjung, SE                              | Biro Umum Setda Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur                                  |
| 35 | Louisa Kristofora Iake, S.T.  | Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                                |
| 36 | Emanuel Eduardo Robby Liko, S.Kom.                                  | RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI                                   |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   | R |
| KABAG. BANTUAN HUKUM                             | b |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | d |